 <b>Pemerintah Kabupaten Buleleng</b> <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>	Nomor SOP	: 600.3.2.6 / SOP.DPUTR 0040-28/1 / 2024
	Tanggal Pembuatan	: 2 / 01 / 2024
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: / / 2024
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, ✓ <b>I Putu Adiptha Ekaputra, ST., MM.</b> NIP. 19740610 200003 1 009
Jabatan Fungsional Ahli Pertama - Penata Ruang	Nama SOP	Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<div>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</div> <div>3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023 - 2043</div> <div>4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033</div> <div>5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan</div> <div>6. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021 – 2041</div> <div>7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terpadu Batuampar</div> <div>8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng No. 94 Tahun 1995 tentang Penetapan Lebar Jalan Sebagai Dasar Penetapan Sempadan</div>	<div>1. Memahami tentang penyelenggaraan penataan ruang</div> <div>2. Memahami ketentuan teknis yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang</div> <div>3. Memahami ketentuan Rencana Tata Ruang (RTR)</div> <div>4. Mampu melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan dan mendapatkan titik koordinat</div> <div>5. Mampu mengoperasikan Arc GIS</div>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
<div>1. Investasi di Kabupaten Buleleng</div> <div>2. Proses Perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (untuk Kegiatan NonBerusaha dan kegiatan yang KBLInya belum diakomodir dalam Sistem OSS)</div>	<div>1. Laporan data permohonan Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten</div> <div>2. ATK, GPS, komputer dan pendukungnya</div>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
Bila SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada proses kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dan dunia investasi di Kabupaten Buleleng, yang secara langsung berakibat pada kualitas lingkungan yang sehat, aman, nyaman dan produktif.	Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten disimpan secara elektronik dan manual sebagai dokumen Negara.

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

### A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten
2	Jenis Kegiatan	: Pelayanan
3	Penanggungjawab	:
	a. Produk	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	b. Kegiatan	: Pejabat Fungsional Ahli Pertama - Penata Ruang
4	Scope (ruang lingkup)	: Kabupaten Buleleng

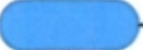
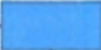








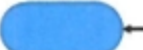
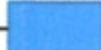
### B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
2	Langkah Awal	: Pengecekan kelengkapan permohonan Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten
3	Langkah Utama	: Proses identifikasi laporan, pengkajian Rencana Tata Ruang (RTR), Penyusunan dokumen Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten
4	Langkah Akhir	: Pemberian Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Menerima instruksi berupa surat disposisi dari Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi untuk memproses permohonan Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten
Langkah Utama	2	Melakukan peninjauan lapangan untuk mengidentifikasi kondisi lapangan dan mendapatkan titik koordinat (apabila diperlukan)
	3	Melakukan input koordinat ke software Arc GIS sehingga didapat rencana peruntukan pola ruang
Langkah Akhir	4	Memberikan Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten kepada Pemohon dalam bentuk soft copy/hard copy.
	5	Arsip/data Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten di Kabupaten Buleleng dalam 1 tahun dalam bentuk soft copy dan hard copy.

**LEMBAR KERJA FLOWCHART SURAT KETERANGAN RENCANA KOTA / KABUPATEN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		PEMOHON (MASYARAKAT/ LEMBAGA)	STAF BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI	KABID TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI	SEKRETARIS DINAS PUTR KAB. BULELENG	KEPALA DINAS PUTR KAB. BULELENG	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Pemohon Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Staf Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mengecek kelengkapan dokumen permohonan						1. Fotocopy Surat Bukti Hak Atas Tanah, 2. Fotocopy Bukti Lunas Pembayaran SPPD (Surat Setor Pajak Daerah) Terbaru, 3. Fotocopy KTP, 4. Surat Kuasa (Apabila An. Pemegang SHM berbeda dengan Pemohon SKRK)	± 30 Menit	surat permohonan	
2	Apabila dokumen belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Bila dokumen dinyatakan telah lengkap, dokumen diterima untuk dilakukan proses lebih lanjut.						Surat permohonan dinyatakan lengkap	± 30 Menit	surat permohonan	pejabat ada di tempat
3	Menerima Disposisi Kepala Dinas						Surat disposisi	± 30 Menit	surat permohonan dan disposisi	pejabat ada di tempat
4	Menerima Disposisi Kepala Bidang, Melaksanakan pengecekan koordinat, kemudian melakukan input koordinat lokasi kedalam aplikasi/software Arc GIS serta pengecekan peruntukan/pola ruang sesuai regulasi yang menjadi dasar/pedoman. Hasil Pengecekan dituangkan dalam bentuk draft SKRK.						ATK, Komputer, Surat Disposisi, GPS, Kendaraan	± 7200 Menit	data peruntukan/pola ruang dalam draft Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten	
5	Proses Penandatanganan Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten secara elektronik (e-Surat)						ATK, draft SKRK	± 480 Menit	Surat Keterangan Rencana Kota	Via e-Surat
6	Pemberian Surat Keterangan Rencana Kota/Kabupaten kepada Pemohon dan diarsip						ATK, Kendaraan, SKRK	± 7200 Menit	Arsip Surat Keterangan Rencana Kota	Via e-Surat